

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN INVESTASI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI BALI**

**Anak Agung Istri Dea Ananda Semara¹
I Nyoman Mahaendra Yasa²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia
E-mail: agungdea0603@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah, tingginya tingkat kemiskinan dapat memberikan dampak buruk terhadap perekonomian, dan menyebabkan kesejahteraan tidak maksimum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung pengaruh pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data sekunder, menggunakan teknik analisis jalur. Hasil analisis data menunjukkan, bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, investasi tidak berpengaruh dan terhadap tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi negatif artinya pendapatan asli daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi positif yang artinya investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, investasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan

ABSTRACT

Economic growth is an indicator of the welfare of the population of an area, high levels of poverty can have a negative impact on the economy, and cause welfare is not maximum. This study aims to analyze the direct and indirect effect of local revenue and investment on economic growth and poverty levels in districts / cities in Bali Province. The data used in this research is secondary data, using path analysis techniques. The results of data analysis show that local revenue has a positive and significant effect on economic growth, investment has no effect on economic growth, local revenue has a negative and significant effect on the poverty level, investment has no effect and on poverty levels, economic growth has no effect on poverty levels, economic growth is a negative mediating variable, meaning that local revenue has an indirect effect on poverty levels, economic growth is a positive mediating variable, which means investment has an indirect effect on poverty levels.

Keywords: local revenue, investment, economic growth, poverty level

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan merupakan upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai, pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa "*National Building*" atau perkembangan sosial ekonomi (Sukirno, 1995: 13). Untuk mencapai pembangunan yang telah dicangkan selama ini dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa kepentingan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan dan sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses pelaksanaan pembangunan (Teguh, 2001: 47).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan rujukan bagi pembangunan daerah atau dapat dikatakan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu konsep pembangunan ekonomi yang disusun direncanakan oleh pemerintah pusat dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah (Teguh, 2001: 47). Sebagai daerah berkembang, kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau golongan dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan, moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Suparlan, 2004: 315).

Kemiskinan merupakan masalah bagi setiap negara didunia, khususnya bagi

negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan akhir suatu negara. Berbagai pemikiran maupun konsep-konsep tentang kemiskinan sudah dikaji dan diadaptasi diberbagai negara berkembang namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, dalam konteks ini Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah berumur 57 tahun, masih dihindangi oleh masalah kemiskinan dimana 14 persen rakyat Indonesia dari kurang lebih 240 juta jiwa saat ini masih dikategorikan sebagai rakyat miskin dengan menggunakan indikator berpendapatan 1\$ perhari, artinya masih ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia. Yang lebih ironis apabila indikator dari bank dunia dimana rakyat miskin adalah orang berpendapatan kurang dari 2\$ perhari maka angka tersebut melonjak menjadi 35 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dalam lima tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara kawasan, ternyata belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga ternyata tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat mengentaskan kemiskinan secara signifikan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, serta belum menghilangkan tingkat disparitas antara golongan kaya dan golongan miskin, hal ini tercermin dalam indeks gini yang mencapai 0,4 artinya adalah terjadi disparitas yang sangat besar dalam penguasaan kekayaan atau kesejahteraan antara golongan terkaya dengan golongan yang termiskin dalam masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya

yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Suparlan, 2000 : 35) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja.

Lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), atau dengan singkat perangkap kemiskinan, adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Teori ini terutama dikaitkan kepada nama Nurkse, seorang ahli ekonomi yang merintis mengenai masalah pembentukan modal di negara berkembang. *World Bank* (2002) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Merubah mainset kemiskinan dari turun-temurun tersebut masih banyak kendala dilapangan. Semakin besar ketimpangan pendapatan antar golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin banyak jumlah penduduk yang

dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan sangat erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan (Sri Budhi, 2013). Indonesia juga terkenal dengan catatan pengurangan kemiskinan, tetapi nasional garis kemiskinan adalah salah satu yang terendah di dunia (Arief, 2015). Pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memperkenalkan sejumlah skema besar keduanya yang ditargetkan secara nasional dan lokal untuk membantu kaum miskin secara langsung (Ashcroft, 2008). Setiap daerah di Indonesia masih mempunyai kantong-kantong kemiskinan, dan tidak terkecuali juga pada daerah Provinsi Bali. Provinsi Bali yang terkenal dengan sektor pariwisatanya, juga mengalami kemiskinan diberbagai kabupaten/kota. Pengembangan pariwisata di Provinsi Bali belum merata, walaupun setiap kabupaten mempunyai potensi adat, budaya dan sumber alam yang hampir sama dengan daerah wisata yang sudah berkembang di Pulau yang indah ini.

Arsyad (2010: 82) menyatakan pertumbuhan ekonomi diharapkan sebagai penggerak roda ekonomi suatu wilayah, dan diharapkan bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Suatu wilayah dinyatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di wilayah tersebut. Menurut (Rori dkk., 2016) peningkatan pendapatan asli daerah akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan, maka kesejahteraan masyarakat akan jelas terlihat, karena peningkatan dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan tingkat pengangguran akan menurun dari peningkatan sektor industri dan perdagangan yang tumbuh, sektor jasa dan sektor-sektor lainnya yang berkaitan

dengan pertumbuhan ekonomi (Priambodo, 2015).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang berkembang, sebenarnya harus diikuti dengan pemerataan dalam bidang distribusi pendapatan dan kesempatan kerja. Mengejar pertumbuhan saja tanpa ada distribusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, tidak akan memberikan makna yang sebenarnya bagi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat jika dalam pemenuhan modal pemerintah daerah hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk pendelegasian pengelolaan keuangan kepada daerah (Kusuma, 2016). Pertumbuhan ekonomi semestinya membawa kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi seperti itu, pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2014–2018, tercermin pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jembrana	6,05	6,19	5,96	5,29	5,59
2	Tabanan	6,53	6,19	6,14	5,37	5,72
3	Badung	6,98	6,24	6,81	6,09	6,75
4	Gianyar	6,80	6,30	6,31	5,48	6,01
5	Klungkung	5,98	6,11	6,28	5,32	5,50
6	Bangli	5,83	6,16	6,24	5,33	5,50
7	Karangasem	6,01	6,00	5,92	5,08	5,48
8	Buleleng	6,96	6,07	6,02	5,39	5,62
9	Denpasar	7,00	6,14	6,51	6,06	6,41
	Provinsi Bali	6,73	6,03	6,33	5,57	6,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2015-2018

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tiap tahunnya dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi. Salah satu dari kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti, Kabupaten Gianyar tahun 2014 pertumbuhan ekonominya sebesar 6,80 persen kemudian turun menjadi 6,30 persen pada tahun 2015, kemudian naik menjadi 6,31

persen pada tahun 2016, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,48 persen dan pada tahun 2018 naik menjadi 6,01 persen. Fluktuasi tidak hanya terjadi di Kabupaten Gianyar, namun terdapat hampir pada semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali.

Dari data secara empiris pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan demikian peningkatan pertumbuhan ekonomi ini merupakan cerminan dari pada kemajuan perekonomian di Provinsi Bali. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya tumbuh dengan bertumbuhnya waktu, serta sejalan dengan sektor-sektor ekonomi yang telah dikembangkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, malahan perkembangan ekonomi yang baik setiap tahunnya, tidak diikuti dengan menurunnya tingkat kemiskinan yang ada pada Provinsi Bali, bahkan menjadi sebaliknya. (Balisacan *et al.*, 2003) menyatakan bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti menurunnya kemiskinan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan sebaliknya.

Untuk meminimisasi keadaan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Bali, pendapatan asli daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat dipergunakan untuk memajukan daerah. Investasi swasta, dan investasi swasta- pemerintahpun telah berkembang dengan baik pada sektor-sektor tertentu mendapat perhatian dan menjadi obyek pendapatan asli daerah, dari hal-hal ini akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah setempat. Namun dalam perjalanannya pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai secara implisit belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan didaerah.

Pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, PAD dari pajak daerah dan sektor retribusi daerah, dan yang tak kalah penting adalah adanya pembagian keuntungan atas partisipasi ekuitas di perusahaan milik daerah (BUMD). Dengan ini, diharapkan akan meningkatkan PAD dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Ada kaitan erat antara pendapatan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh daerah, semakin tinggi peluang untuk mengembangkan ekonomi regional (Supriati, 2018).

PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi UU Nomor 33 Tahun 2004. Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah merupakan pungutan-pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan kewenangan daerah sesuai dengan pasal-pasal tersebut, PAD yang terpungut berdasarkan data yang dapat dikumpulkan mengenai jumlah pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal

lama yang harus didepresiasi (Sukirno, 2008: 121). Investasi umumnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, pemerintah-swasta dan investasi oleh pihak luar negeri. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta lebih dikenal dengan sebutan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sedangkan investasi dari pihak luar negeri dikenal dengan sebutan PMA (Penanaman Modal Asing).

Dengan adanya investasi maka kapasitas dalam memproduksi akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi output yang dihasilkan, meningkatnya output akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, juga mencerminkan tinggi dan lesunya pembangunan. Kegiatan investasi diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kehadirannya mampu berperan sebagai motor penggerak dan sekaligus menjadi pendorong percepatan pembangunan secara luas. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dicerminkan dengan aktivitas investasi pada wilayah tersebut, Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan *multiplier effect* terhadap sendi-sendi kehidupan, seperti lingkungan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi akan mengakibatkan bergairahnya aktivitas ekonomi dan merangsang tumbuhnya investasi dan semakin terbukanya kesempatan kerja (Suartha, 2017).

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Tidak setiap negara selalu mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan perkembangan kemampuan yang semakin meningkat. Banyak negara dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya masih lebih jauh

dari potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Dengan demikian diperlukan perhatian yang lebih dalam untuk membuat kecenderungan pertumbuhan ekonomi tersebut terus meningkat (Taufik, 2014). Brata (2004) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan penelitian oleh Tambunan (2006) yang menyatakan pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri (Tambunan, 2006). Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Daerah tidak akan berhasil apabila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Dengan adanya

penerimaan dari PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sector jasa, dan sektor-sektor lainnya. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber– sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi.

Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalanya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang

dilihat dari pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke tahun (Brata, 2004), mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah kehubungan negatif jika daerah terlalu otensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya. PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002).

PAD berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Meningkatnya PAD maka tingkat kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya dikatakan semakin baik dan ketergantungan terhadap subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat berkurang. PAD berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Meningkatnya PAD maka tingkat kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya dikatakan semakin baik dan ketergantungan terhadap subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat berkurang. Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengakibatkan pungutan pajak meningkat dan meningkatnya penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap PAD. Hal ini menandakan PAD berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah berdampak signifikan terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Menurut Undang Undang 28 tahun 2009 PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah (Kuncoro, 2006:497).

Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Menurut Brata (2004) terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan bantuan.

Pujiati (2008) menyatakan dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD sehingga komposisi PAD sebagai penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Otoritas pemerintah daerah diharapkan untuk mempromosikan Tidak hanya partisipasi politik dalam pengambilan keputusan, mereka juga memiliki tanggung jawab memajukan sosial-ekonomi pengembangan untuk penduduk setempat (Akudungu, 2012).

Investasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Karena pemerintah setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju terus berupaya meningkatkan investasi di negaranya, baik investasi yang bersumber dari dalam negeri maupun investasi luar negeri. Investasi merupakan suatu alat untuk mempercepat pertumbuhan di suatu negara yang sedang berkembang. Hal ini menjelaskan bahwa investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Hasibuan, 1990:112). Terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu : pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanam, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan

memperbanyak jumlah angkatan kerja. Dan ketiga kemajuan teknologi (Todaro, 2000 : 505).

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018, dilihat dari luas wilayah dan sumber daya yang memiliki potensi dan peluang besar dalam pendapatan asli daerah, investasi, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi yang dimiliki dan tingkat kemiskinan yang terjadi pada kurun tahun tersebut. Alasan memilih penelitian di kabupaten/kota di Provinsi Bali karena lokasi penelitian ini masing-masing wilayah memiliki letak geografis dan sumber daya yang berbeda sehingga pola pertumbuhan ekonominya mengalami disparitas dimana terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, mempelajari uraian-uraian dari buku-buku, artikel, serta melakukan pengamatan terhadap PAD, investasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali atau www.bpsbali.go.id untuk mengukur variabel yang akan dipergunakan sebagai sampel dalam penelitian, untuk dianalisis.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Didapat 2 persamaan struktural yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan yaitu :

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur β_1 , pengaruh langsung Investasi (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) ditunjukkan oleh koefisien jalur β_2 , pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur β_3 , pengaruh langsung Investasi (X_2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur β_4 , pengaruh langsung Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur β_5 , pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) diperoleh dengan cara mengalikan koefisien jalur β_1 dengan koefisien jalur β_5 , pengaruh tidak langsung Investasi (X_2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) diperoleh dengan cara mengalikan koefisien jalur β_2 dengan koefisien jalur β_5 . Pengaruh total tidak langsung PAD (X_1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2) dan Investasi (X_2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_2) diperoleh dengan menjumlahkan pengaruh langsung dan tidak langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur nilai sentral dari distribusi data dapat dilakukan dengan pengukuran rata-rata (*mean*) sedangkan standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	45	7614161.000	4555716407.000	684831702.20000	1096852344.648211
Investasi	45	1143.000000	4899094.000000	676830.77777778	1181848.434004314
Pertumbuhan Ekonomi	45	5.08	7.00	6.0382	.48693
Tingkat Kemiskinan	45	1.98	7.44	4.9231	1.65177
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data diolah, 2020

Statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai minimum variabel PAD (X_1) sebesar 7.614.161.000 dan nilai maksimum variabel PAD (X_1) 4.555.716.407.000, rata-ratanya (*mean*) sebesar 68.483.170.220.000 yang lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 1.096.852.344.648.211. Nilai minimum variabel investasi (X_2) sebesar 1.143.000.000 dan nilai maksimum variabel investasi (X_2) 4.899.094.000.000, rata-ratanya (*mean*) sebesar 67.683.077.777.778 yang lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 1.181.848.434.004.314. Nilai minimum variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) sebesar 5.08 dan nilai maksimum variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) 7.00 persen, rata-ratanya (*mean*) sebesar 6.0382 yang lebih besar dari standar deviasi sebesar 0.48693. Nilai minimum variabel tingkat kemiskinan (Y_2) sebesar 1.98 dan nilai maksimum variabel tingkat kemiskinan (Y_2) sebesar 7.44, rata-ratanya (*mean*) sebesar 4.9231 yang lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 1.65177.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan antar variabel penelitian yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Koefisien jalur dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur (Suyana, 2016: 159). Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam persamaan struktural, yaitu:

Persamaan Struktural 1

$$Y_1 = 0,427X_1 + -0,031 X_2 + 0.908 + e_1$$

Persamaan Struktural 2

$$Y_2 = -0,641 X_1 + -0,002X_2 + -0,169Y_1 + 0,685 + e_2$$

Nilai kekeliruan taksiran standar untuk variabel bebas pendapatan asli daerah (X_1) dan inestasi (X_2) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Adapun nilai kekeliruan taksiran standar yaitu :

$$e_i = \sqrt{1 - R_1^2}$$

$$e_1 = \sqrt{1 - 0.174}$$

$$e_1 = 0,908$$

Sedangkan Nilai kekeliruan taksiran standar untuk tingkat kemiskinan (Y_2) menunjukkan jumlah varian tingkat kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas pendapatan asli daerah (X_1), investasi (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1).

Adapun nilai kekeliruan taksiran standar yaitu :

$$e_2 = \sqrt{1 - R_2^2}$$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0.530}$$

$$e_2 = 0.685$$

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya yaitu sebagai berikut.

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - e_1^2 \cdot e_2^2 \\ &= 1 - (0,908)^2 (0,685)^2 \\ &= 1 - (0,824) (0,496) \\ &= 1 - 0,386 \\ &= 0.614 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 0,614 atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 61,4 persen yang dapat dijelaskan oleh model, dan sisanya sebesar 38,6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Uji kelayakan model atau yang sering disebut dengan uji F merupakan tahapan awal untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Adapun hasil uji kelayakan model struktur 1 dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Model Struktur 1

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.812	2	.906	4.415	.018 ^b
	Residual	8.620	42	.205		
	Total	10.432	44			

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 3 menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,018 yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ maka model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa pendapatan asli daerah dan investasi mampu memprediksi atau menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, ini berarti model pada struktur 1 dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut atau dengan kata lain model dapat digunakan untuk memproyeksikan karena hasil *goodness of fitnya* baik dengan nilai F hitung sebesar 4.415 dengan nilai signifikansi sebesar 0,018.

Tabel 4. Hasil Uji Kelayakan Model Struktur 2

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63.580	3	21.193	15.388	.000 ^b
	Residual	56.468	41	1.377		
	Total	120.048	44			

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4 menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai

$\alpha = 0,05$ maka model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa pendapatan asli daerah, investasi dan pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali ini berarti model pada struktur 2 dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut atau dengan kata lain model dapat digunakan untuk memproyeksikan karena hasil *goodness of fitnya* baik dengan nilai F hitung sebesar 15.388 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Pengujian persamaan satu dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018 secara langsung, hasil uji regresi disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	5.917	.084			70.592	.000
Pendapatan Asli Daerah	1.896E-10	.000	.427		2.839	.007
Investasi	-1.281E-8	.000	-.031		-.207	.837

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X_1) dengan nilai sig. $0,007 < 0,05$, ini berarti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Bali. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian (Pujiati, 2008) dimana PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun menurut teori yang ada, peningkatan PAD akan menimbulkan eksternalitas yang positif dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini didukung oleh jurnal (Pujiati, 2008) peningkatan PAD akan menimbulkan eksternalitas yang positif dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan juga di dukung oleh penelitian dari Mawarni (2013) yang menyatakan, bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel investasi (X_2) dengan nilai sig. $0,837 > 0,05$, ini berarti bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan investasi menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi di provinsi di Indoensia (Sulistiawati, 2012).

Pengujian persamaan dua dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah, investasi, pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018 secara langsung, hasil uji regresi disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.039	2.375		3.806	.000
Pendapatan Asli Daerah	-9.647E-10	.000	-.641	-5.108	.000
Investasi	-2.881E-9	.000	-.002	-.018	.986
Pertumbuhan Ekonomi	-.572	.400	-.169	-1.431	.160

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X_1) memiliki *Standardized coefficients Beta* -0,641 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, ini

berarti bahwa pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) di kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018. Variabel investasi (X_2) dengan nilai sig. 0,986 > 0,05, ini berarti bahwa investasi (X_2) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018. Mustamin & Nurbayani (2015) yang menyatakan bahwa adanya hasil yang tidak berpengaruh antara investasi dengan kemiskinan disebabkan diduga kebanyakan investasi yang ada hanya dilakukan oleh kaum menengah ke atas, dan itu hanya berdampak pada kehidupan mereka masing-masing, dan tidak memberikan pengaruh terhadap kehidupan penduduk miskin. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sector titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Ravi, 2010).

Variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1) dengan nilai sig. 0,160 > 0,05 ini berarti pertumbuhan ekonomi (Y_1) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) di kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2018. Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan hasil studi yang dilakukan oleh Sumarto (2002) dari SMERU yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Untuk Mengetahui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi dari pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dapat dihitung sebagai berikut.

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S\beta_1\beta_5 = \sqrt{(-0,727)^2 (0,000)^2 + (1,896)^2 (0,400)^2}$$

$$S\beta_1\beta_5 = 0,575$$

Berdasarkan perhitungan uji sobel untuk menguji signifikansi variabel mediasi harus menghitung nilai nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\beta_1\beta_5}{S\beta_1\beta_5}$$

$$z = \frac{(1,896) (-0,572)}{0,575}$$

$$z = -1,886$$

Oleh karena nilai $-1,96 < z \text{ hitung} = -1,886 < 1,96$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel mediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hal tersebut berarti bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan juga tingkat kemiskinan wilayah. Untuk Mengetahui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi dari pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus:

$$S\beta_1\beta_5 = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S\beta_1\beta_5 = \sqrt{(-0,727)^2 (0,000)^2 + (1,896)^2 (0,400)^2}$$

$$S\beta_1\beta_5 = 0,575$$

Berdasarkan perhitungan uji sobel untuk menguji signifikansi variabel mediasi harus menghitung nilai nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\beta_2\beta_5}{s\beta_2\beta_5}$$

$$z = \frac{(-1,281) (-0,572)}{0,262}$$

$$z = 2,79$$

Oleh karena nilai z hitung sebesar 2,79 > z tabel sebesar 1,96, maka Ho ditolak.

Artinya pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Adapun pengaruh total dan hasil uji koefisien jalur dapat dijelaskan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 7. Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung Dan Pengaruh Total Variabel

Pengaruh Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung Melalui Pertumbuhan ekonomi Y1		Pengaruh Total
		(p1 x p5)	(p3 x p5)	
X1 → Y1	0,427	-	-	0,427
X1 → Y2	-0,031	-0,07	-	0,021
X2 → Y1	-0,641	-	-	-0,641
X2 → Y2	-0,002	0,052	-	0,05
Y1 → Y2	-0,169	-	-	-0,169

Sumber: Data diolah, 2020

Nilai *standardized coefficient* digunakan untuk mendapatkan koefisien yang memiliki basis unit yang sama, sehingga dapat dibandingkan secara langsung antar variabel eksogen, dalam pengaruhnya masing-masing terhadap variabel endogen. Variabel eksogen mana yang berpengaruh lebih besar terhadap variabel endogen dapat dilihat dari besar kecilnya masing-masing koefisien (*beta*) *regressor*.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang berfokus pada pengaruh pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Bali, maka implikasi hasil penelitian ini adalah apabila di wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali mampu memaksimalkan peningkatn PAD setiap

tahunnya dan mengevaluasi pendapatan yang diterima oleh daerah maka akan dapat mendukung peningkatan ekonomi wilayah, karena daerah memiliki tingkat pendapatan yang lebih sesuai dengan PAD yang diterima, maka akan mengalami peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal senada juga dengan investasi, apabila di wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali mampu terus meningkatkan penanaman modalnya maka hal tersebut akan berdampak semakin baik terhadap pendapatan asli daerah, sehingga banyaknya peluang kerja perbaikan sarana prasana infrastruktur daerah yang berkualitas akan semakin besar serta dalam mensejahterakan masyarakat yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di wilayah dalam mewujudkan wilayah kabupaten/kota di Bali yang semakin baik, maju dan berkeadilan.

SIMPULAN

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan analisis dan simpulan maka dapat disarankan sebagai berikut. Pemerintah pusat maupun daerah di Provinsi Bali harus memperhatikan dan lebih fokus mengembangkan potensi daerah masing-masing agar sarana prasarana publik dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, selain itu juga diharapkan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi tidak sampai membebankan pelaku usaha, sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan lahan investasi yang baik dengan mempermudah investor dalam pengurusan perijinan untuk melakukan investasi, sehingga apabila kondisi perekonomian dan birokrasi dalam pengurusan perijinan dipermudah ini akan menambah minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Bali akan tinggi dan dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi pendapatan asli daerah agar bisa berpengaruh langsung terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, maka selayaknya mengawasi penggunaannya yang telah diberikan kewenangan, agar tidak terjadi penyelewengan pada sektor-sektor yang benar-benar bisa mengangkat derajat halayak masyarakatnya.

Pemerintah dalam hal ini agar dapat lebih mengenalkan lagi investor terhadap sektor-sektor lain di Provinsi Bali yang belum disentuh dan mempunyai potensi untuk berkembang bila di investasikan, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dapat merata ke daerah-daerah yang belum di sentuh oleh investor dan tidak terfokus kedaerah itu-itu saja. Untuk mengurangi kemiskinan di daerah, pemerintah seharusnya dapat lebih meningkatkan lapangan kerja yang dimana dapat menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu pemerintah juga

harus membatasi investasi pada daerah yang pertumbuhannya sudah tinggi dan menyebarkan investasi beserta infrastruktur pendukungnya pada daerah yang jarang mendapatkan investasi dalam upaya mencegah terjadinya disparitas.

REFERENSI

- Akudungu, Jonas Ayaribilla. 2012. Accountability In Local Government Revenue Management; Who Does What?. *International Journal Information And Knowledge Management*, 2(8), Pp: 22-33.
- Arief Anshory Yusuf, Andy Sumner. 2015. growth, poverty, and inequality under jokowi. *Bulletin of Indonesian economic studies (BIES)*, 51(3):323-348.
- Ashcroft, Vincent and david cavanough. 2008. Survey of recent developments. *Bulletin of Indonesian economic studies (BIES)*, 44(3),:335-363.
- Arsyad, Licolin, 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima. UPP STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2018. Bali dalam angka. bps provinsi bali.
- Balisacan, Arsenio M., Pernia, Ernesto M. & Asra, Abuzar. 2003. *Revisiting, Growth and Poverty Reduction in Indonesia: What Do Subnational Data Show?*. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, Vol 39. No. 3.
- Budi Santosa, Purbayu dan Puji Rahayu, Retno. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*. Vol 2. No 1. hal: 9-18.
- Eka Putri, Zuwesty. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5, No. 2 : 174-175.
- Eko Caraka, Rezzy. 2019. Pemodelan Regresi Panel Pada Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 12 No. 1 : 55-61.
- Hasibuan, MalayuSP, 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kunci Keberhasilan*. Haji Masagung, Jakarta, 1990.

- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 9 No. 1 : 1 - 11
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi . Yogyakarta.
- Mawarni Abdullah Syukry, dan Darwanis. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Kajian Ekonomi* Vol 2 (2): 83-84
- Mustamin, Siti Walida, Agussalim, Sri Undai Nurbayani. 2015. Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis*, Desember 2015, Vol. 4 No.2 : 165-173. ISSN 2303-100X
- Priambodo, agung.2015. Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. *Economics Development Analysis Journal*.4(1),1-9.
- Pujiati, Amin. 2008. Analisis Belanja langsung di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. Vol. 13(2): 61-70.
- Rimbawan, Nyoman Dayuh. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja (Kasus Provinsi Bali, 2001--2011). *Jurnal Piramida*. Vol. Viii No. 2 : 76 – 84.
- Rori, Chindy febry, antonius y luntungan dan audie o niode. 2016. Analisis Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sulawesi utara tahun 2001-2013. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*,16(2),243-254.
- Sri Budhi, Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1),1-6.
- Suartha, Nyoman. 2017. Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.10, No. 1 : 95-107.
- Sulistiawati, Rini. 2012. “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”. *Jurnal Eksos*, Vol 8. No. 3, Oktober 2012.
- Suparlan, parsudi. 2000. *Asas Manajemen*, Jakarta.

- Supriati Lms, Kristiyani Haji. 2018. Improving Regional Original Income With Tax Receipt, Regional Retribution And Regional Wealth Management Results In Solo Raya. *International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR)*. Vol- 2, Issue-3, ISSN: 2614-1280.
- Suryahadi, A., D. Suryadarma. dan Sumarto,A. (2006).Economic Growth andPoverty Reduction in Indonesia: *The Effects of Location and Pectoral Components of Growth. SMERU Working Paper*.
- Suryahadi, Asep Gracia Hadiwidjaja And Sudarno Sumarto. 2012. Economic Growth And Poverty Reduction In Ndongesia Before And After The Asian Financial Crisis. *Bulletin Of Indonesia Economic Studies (BIES)*, Vol.48 (2). Hal, 212.
- Syahyuti, 2006. 30 *Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variabel*. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2004. *Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Kemiskinan: utndonesia*. Dalam Kajian Ekonomi Jurnal Penelitian Bidang Ekonomi. Vol. 3 No. 2. Penerbit: Universitas Sriwijaya Palembang
- Taufik, Muhammad. 2004. Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 7(2): 90-101.
- Teguh Yuwono, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah*, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang.
- Todaro, Michael P. 2000 . *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.

